



## PENETAPAN

Nomor 0682/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perubahan biodata dalam akta nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh :

**SITI ROHMAH binti ABD. SUKUR** umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kawi Rt.014 Rw.004 Dusun Mangir Desa Mangunrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 14 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0682/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 14 Mei 2018 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 04 Februari 1972, Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Kawi Rt.014 Rw.004 Dusun Mangir Desa Mangunrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, kurang lebih selama 43 tahun 8 bulan; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. SAMSUL MA'ARIF, umur 43 tahun;
  - b. NUR ANITA MA'RIFATULLILLAH, umur 39 tahun;
  - c. IMAM FAHRUDIN, umur 32 tahun;

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0682/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan nomor: 58/30/II/1972 sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: B-56/Kua.13.35.12/Pw.01/05/2018 tanggal 14 Mei 2018;
4. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2015 karena Sakit, sesuai dengan surat kematian dari Desa Mangunrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Nomor: 474.2/42/35.07.13.03/2018 tanggal 14 Mei 2018;
5. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni: Nama Pemohon: SITI ROCHMAH binti ABD. SUKUR Tempat, tanggal lahir, Malang, 17 tahun. Sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon: SITI ROHMAH binti ABD. SUKUR Tempat, tanggal lahir: Malang, 30 Oktober 1950;
6. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon: SITI ROCHMAH binti ABD. SUKUR Tempat, tanggal lahir, Malang, 17 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/30/II/1972 sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: B-56/Kua.13.35.12/Pw.01/05/2018 tanggal 14 Mei 2018 sebenarnya adalah Nama Pemohon: SITI ROHMAH binti ABD. SUKUR Tempat, tanggal lahir: Malang, 30 Oktober 1950;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0682/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor 712/182/35.07.13.03/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mangunrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor: B-56/Kua.13.35.12/Pw.01/05/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Pemohon Nomor 474.1/13/35.07.13.2003/2018 tanggal 24 Mei 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mangunrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Asli Surat Kematian atas nama Moch. Jasur Nomor 474.2/42/35.07.13.03/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mangunrejo Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Asli Surat Keterangan Identitas atas nama Pemohon Nomor 712/160/35.07.13.03/2018 tanggal 08 Mei 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mangunrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0682/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Asli Surat Keterangan Perubahan Biodata atas nama Pemohon Nomor B-360/Kua.13.35.12/Pw.01/05/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : ABDUL ROJAK bin SAKUR, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Dusun Mangir RT.014 RW.004 Desa Mangunrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak merubah biodata pada buku nikahnya;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yang ada di buku nikah salah dan yang benar adalah SITI ROHMAH. Sedangkan suami Pemohon sudah meninggal dunia;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : DUL WAKIM bin ALHAMI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Mangir RT.014 RW.004 Desa mangunrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak merubah biodata pada buku nikahnya;

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0682/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yang ada di buku nikah salah dan yang benar adalah SITI ROHMAH. Sedangkan suami Pemohon sudah meninggal dunia;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan nikah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, dan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syariah”, karenanya perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon setelah menikah mendapatkan Kutipan Akta Nikah namun terdapat kesalahan penulisan biodata Pemohon dalam Akta Nikah yang diperolehnya, karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perubahan biodata dalam akta nikah*;

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0682/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon perubahan biodata dalam akta nikah yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopinya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.2) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi Pemohon menerangkan isi biodata yang ada dalam bukti ini tidak benar, karenanya nilai pembuktian akta ini menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan akta lain, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.3, P.4, P.5 dan P.6) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1 dan P.3) adalah surat keterangan domisili dan surat kelahiran atas nama Pemohon memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan biodata Pemohon tertulis Nama Pemohon: SITI ROHMAH binti ABD. SUKUR Tempat, tanggal lahir: Malang, 30 Oktober 1950;

Menimbang bahwa alat bukti (P.2) memberi bukti bahwa biodata Pemohon yang tertulis dalam akta nikah adalah Nama Pemohon: SITI ROCHMAH binti ABD. SUKUR Tempat, tanggal lahir, Malang, 17 tahun, dan

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0682/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pemohon memohonkan untuk perubahan biodata pada akta nikah yang dimilikinya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.4) memberi bukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.5 dan P.6) memberi bukti bahwa biodata Pemohon adalah Nama Pemohon: SITI ROCHMAH binti ABD. SUKUR Tempat, tanggal lahir, Malang, 17 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 58/30/II/1972 sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: B-56/Kua.13.35.12/Pw.01/05/2018 tanggal 14 Mei 2018] tanggal 04 Februari 1972 sebenarnya adalah Nama Pemohon: SITI ROHMAH binti ABD. SUKUR Tempat, tanggal lahir: Malang, 30 Oktober 1950;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan para pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 58/30/II/1972 sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: B-56/Kua.13.35.12/Pw.01/05/2018 tanggal 14 Mei 2018] tanggal 04 Februari 1972, sebagaimana bukti P.2;
2. Bahwa penulisan biodata Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah Nama Pemohon: SITI ROCHMAH binti ABD. SUKUR Tempat, tanggal lahir, Malang, 17 tahun;
3. Bahwa biodata Pemohon dalam akta lain yang dimiliki Pemohon adalah Nama Pemohon: SITI ROHMAH binti ABD. SUKUR Tempat, tanggal lahir: Malang, 30 Oktober 1950;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0682/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa biodata Pemohon yang terdapat dalam Akta Nikah (P.2) seharusnya sama dengan biodata yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta akta-akta lainnya yang dimiliki oleh Pemohon sebelumnya, sehingga jika terjadi perbedaan biodata antara dokumen yang dimiliki oleh penduduk maka harus mengikuti data yang ada dalam bukti diri penduduk dan/atau dokumen yang dimiliki sebelumnya;

Menimbang bahwa kesalahan biodata dalam akta nikah tersebut menjadikan Pemohon mengalami *kesulitan* dalam mengurus dokumen kependudukan, yaitu karena tidak samanya identitas dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon yaitu antara Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Kutipan Akta Nikah, yang merupakan persyaratan dalam pengurusan dokumen kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merubah biodata Pemohon yang ada dalam kutipan akta nikah dan menyesuaikannya dengan yang ada dalam KTP, Kartu Keluarga atau Ijazah akan menjadikan Pemohon tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Menimbang bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih "*menghilangkan kesulitan atau kemafsadatan harus didahulukan dari pada memperoleh manfaat*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan Pasal 1 angka (5) jo. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0682/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 dikabulkan maka petitum nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan biodata Pemohon yaitu Nama Pemohon: SITI ROCHMAH binti ABD. SUKUR Tempat, tanggal lahir, Malang, 17 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 58/30/II/1972 sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: B-56/Kua.13.35.12/Pw.01/05/2018 tanggal 14 Mei 2018] tanggal 04 Februari 1972 diubah menjadi Nama Pemohon: SITI ROHMAH binti ABD. SUKUR Tempat, tanggal lahir: Malang, 30 Oktober 1950;

Menimbang bahwa sesuai dengan petitum permohonan Pemohon nomor 3 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 4 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon: SITI ROCHMAH binti ABD. SUKUR Tempat, tanggal lahir, Malang, 17 tahun; yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/30/II/1972 sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: B-56/Kua.13.35.12/Pw.01/05/2018 tanggal 14 Mei 2018] tanggal 04 Februari 1972 diubah menjadi Nama Pemohon: SITI ROHMAH binti ABD. SUKUR Tempat, tanggal lahir: Malang, 30 Oktober 1950;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0682/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **30 Mei 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Ramadan 1439 Hijriyah**, oleh kami **H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABD. RAZAK PAYAPO** dan **H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. ABD. RAZAK PAYAPO**

Hakim Anggota II,

**H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES.**

**H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.**

Panitera Pengganti,

**Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	80.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>171.000,-</b>

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0682/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg